

Surat Tugas

Nomor : 00608/H.3/ST.LPPM/04/2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan ini memberi tugas kepada

Nama :1. Prof. Dr. Ir. BUDI WIDIANARKO, M.Sc. (Biologi, Pangan)
2. Dr. Dra. A. IKA RAHUTAMI, M.Si. (Ekonomi)
3. Dr. AUGUSTINA SULASTRI, S.Psi. (Psikologi)
4. Dr. Y. ENDANG WAHYATI, S.H., M.H. (Hukum Kesehatan)
5. Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si. (Ekonomi, Manajemen)
6. Y.B. DWI SETIANTO (Teknik Informatika)
7. PERIGRINUS HERMIN SEBONG, S.Km.,M.PH (Kesehatan Masyarakat)

Status :Dosen Universitas Katolik Soegijapranata

Tugas :Tim Kajian Tanggapan Cepat Covid 19 untuk Menyusun Roadmap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menangani Covid 19 Konsultasi, pendampingan klien, ceramah, penyuluhan insidental, kursus, penataran, dll sejenis

Waktu :02 - 04 April 2020

Tempat:Unika Soegijapranata - Semarang

Harap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas

Semarang, 17 April 2020
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.

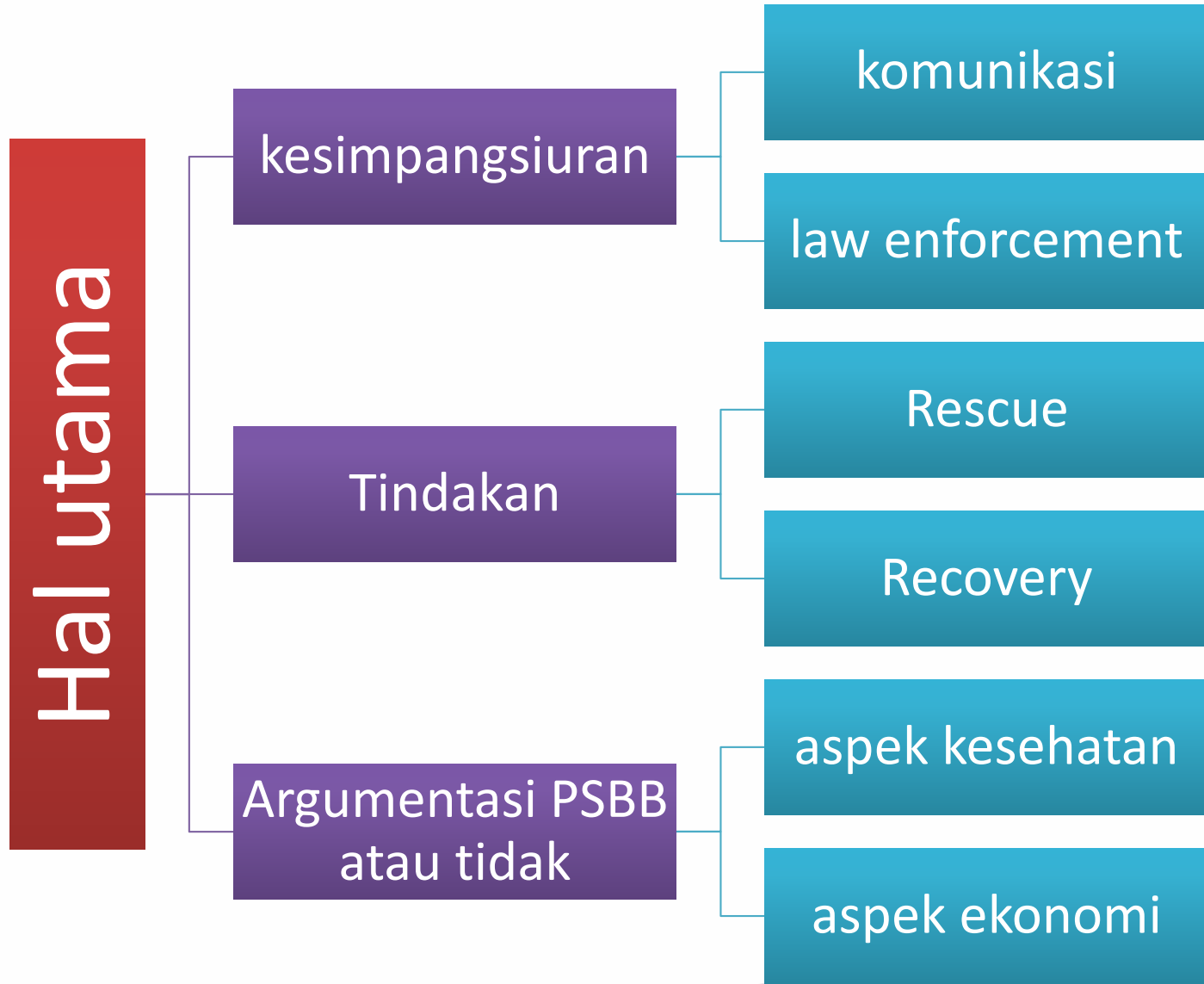


PENANGGULANGAN COVID-19

19 APRIL 2020

BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

ANGELINA IKA RAHUTAMI



Komunikasi untuk menghindari kesimpangsiuran

- PSBB itu sebenarnya apa?
- Komunikasi untuk level yang paling bawah → tidak bisa ada jejaring medsos, atau kalau pun ada medsos lebih dibanjiri dengan hal-hal yang mungkin kontraproduktif
- Apakah sudah ada SOP yang jelas sampai ke tingkat desa/RW agar tidak tiap orang memaknai PSBB sendiri
- Motivasi bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, ini masalah kita bersama → gotongroyong

Hal yang sangat perlu dilakukan

- Rescue → jangka pendek
- Recovery → jangka menengah dan panjang
- Masalahnya dalam rescue itu adalah kita harus fokus pada health before wealth.
 - indikator keberpihakannya apa?
 - Apakah ketikah persentase APBD lebih besar digunakan untuk beli APD dan support RS?
 - Padahal pada waktu yang sama, saat ini daya beli sudah sangat turun sehingga perlunya jaring pengamana → kalau secara kuantitas maka jumlah orang yang perlu jaring pengaman jauh lebih banyak

Hal yang sangat perlu dilakukan - Rescue

- Masalahnya dalam rescue itu adalah kita harus fokus pada health before wealth.
 - indikator keberpihakannya apa?
 - Apakah ketikah persentase APBD lebih besar digunakan untuk beli APD dan support RS?
 - Padahal pada waktu yang sama, saat ini daya beli sudah sangat turun sehingga perlunya jaring pengamana → kalau secara kuantitas maka jumlah orang yang perlu jaring pengaman jauh lebih banyak
- APBN + APBD → refocussing, realokasi
- Target penerima → di Jakarta banyak kasus klasik pembagian bansos hanya memiliki target angka

Hal yang sangat perlu dilakukan - Recovery

- Dilakukan setelah kurva menjadi landai
- Penyiapan mulai bisa dipikirkan
- Bauran kebijakan
- Biarkan sektor moneter yang saat ini menyiapkan landasannya
- Biarkan sektor fiskal saat ini konsentrasi pada rescue

PSBB di Jateng

- Apakah memang diperlukan?
- Bila iya kapan perlu dilakukan? Pada kasus seperti apa?
- Bila iya seberapa besar cakupannya?
- Berapa lama dberlakukan? → apakah cukup 2 minggu seperti masa inkubasi

Argumentasi ekonomi

- Pada kondisi wabah → health before wealth, sehingga rasionalisasi ekonomi "garis keras" tidak dapat dipakai
- Mengorbankan ekonomi bagi humanisme
- ketika human death dan terinfeksi semakin kecil maka beban ekonomi akan semakin kecil karena tidak terjadi human capital loss → berapa besar sih sebetulnya human loss kita? → ini lebih ke masalah kemanusiaan
- Bagaimana kekuatan APBN dan APBD?
- Bagaimana perputaran ekonomi?

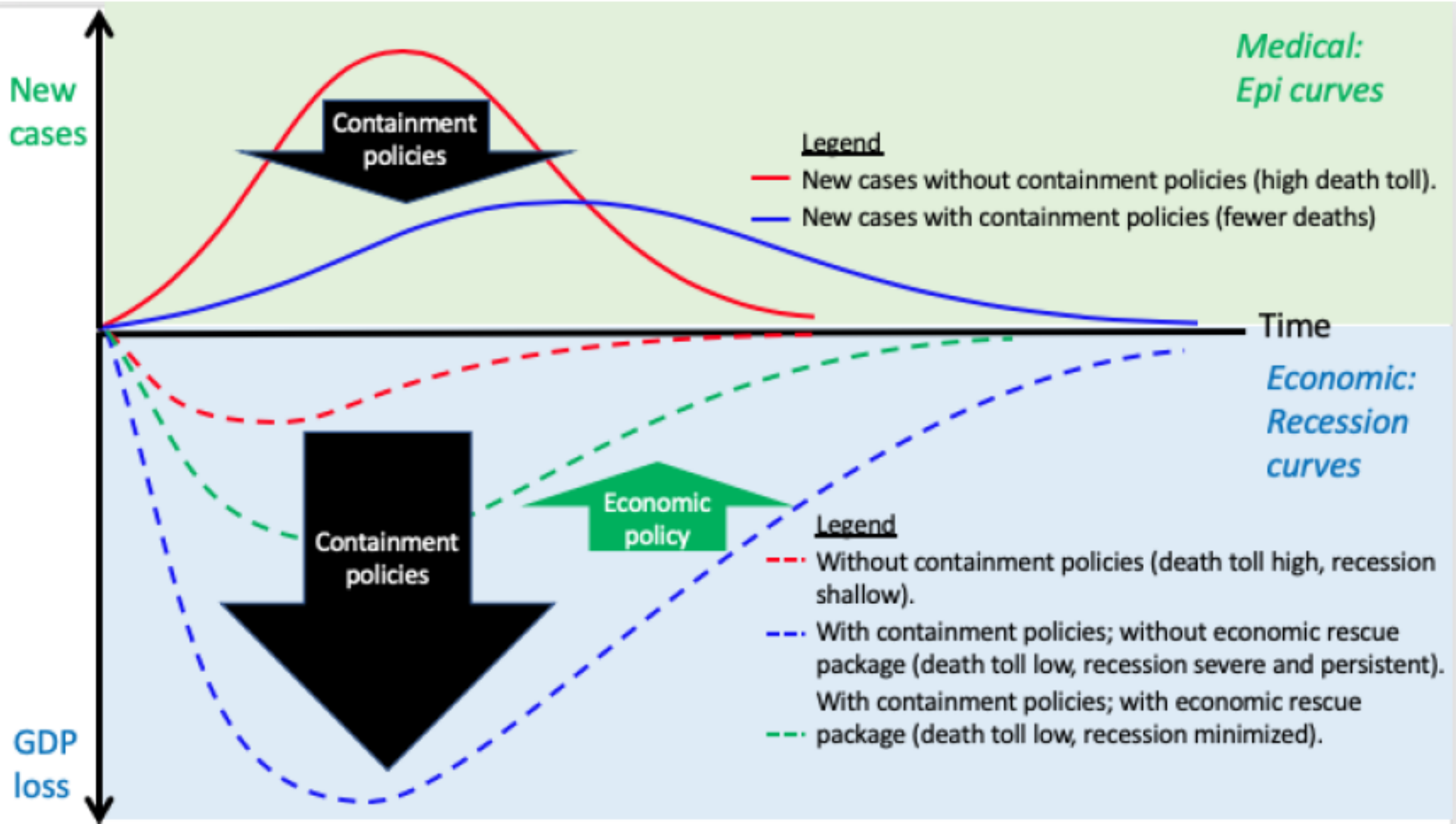
Argumentasi ekonomi

- Suply-demand doom loop (Fornano & wolf, 2020)

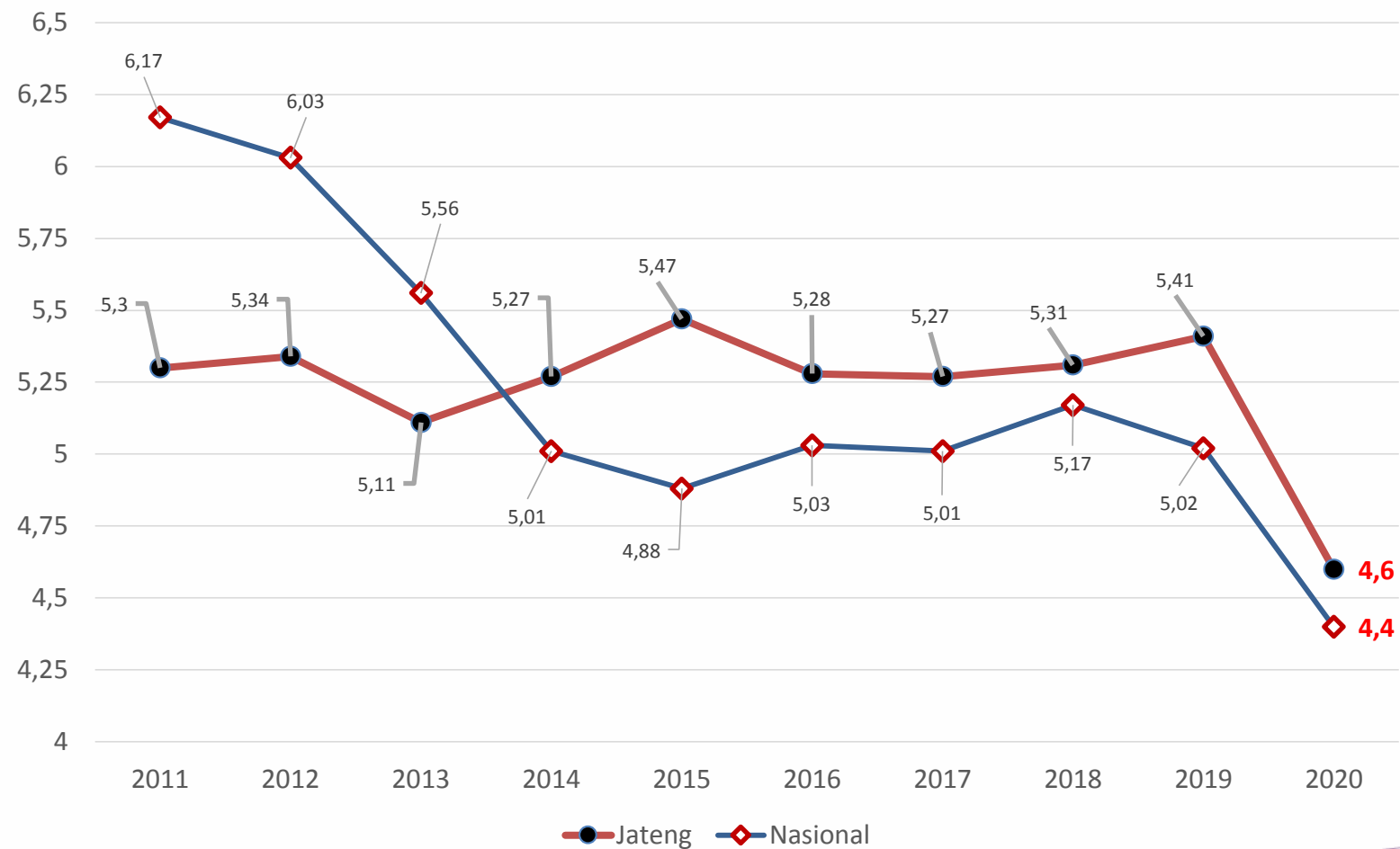


Sumber: Abstraksi penulis berdasarkan Fornano & Wolf (2020)

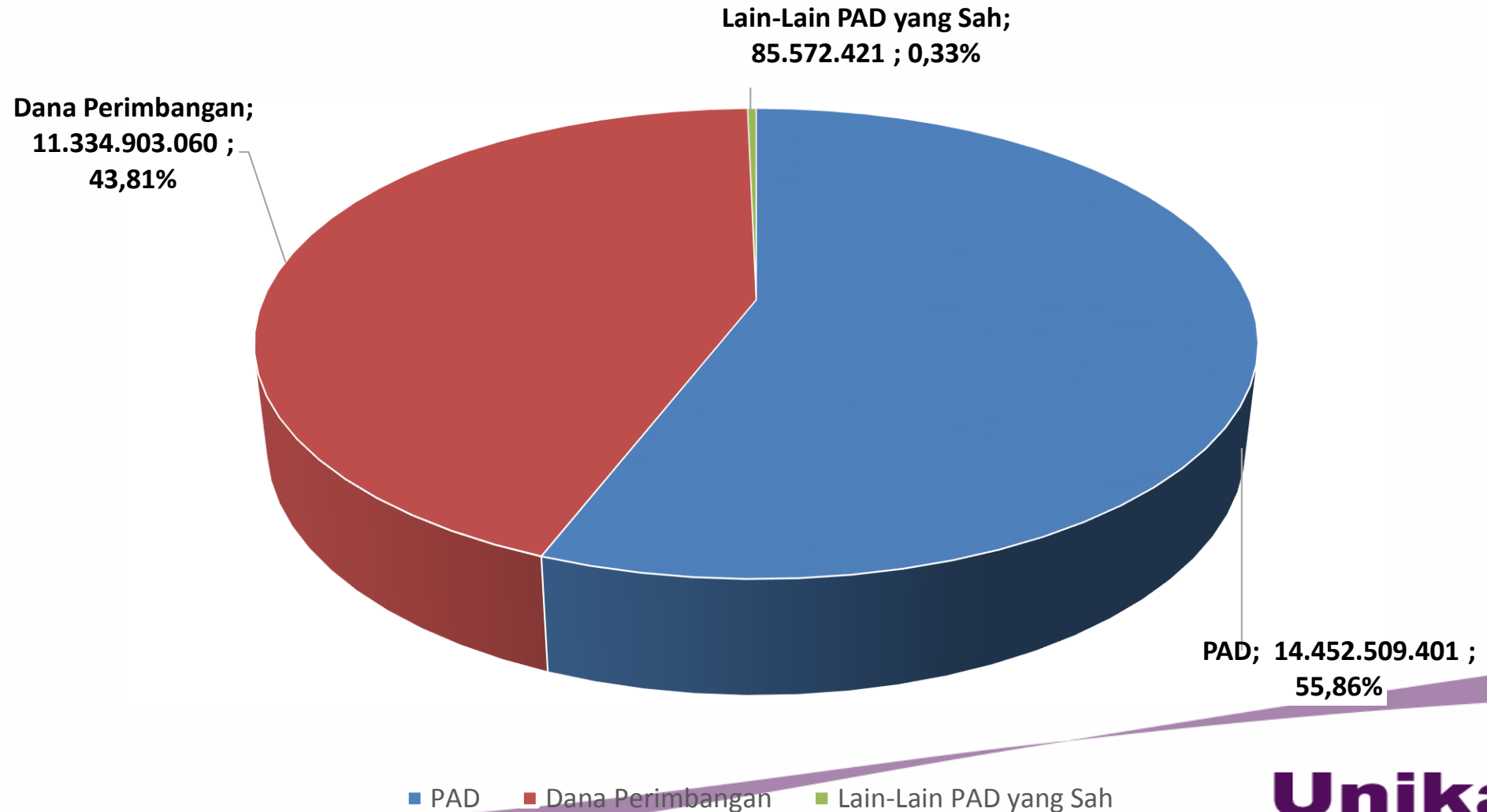
Two Curve Problems – Between Epidemic and Recession curves



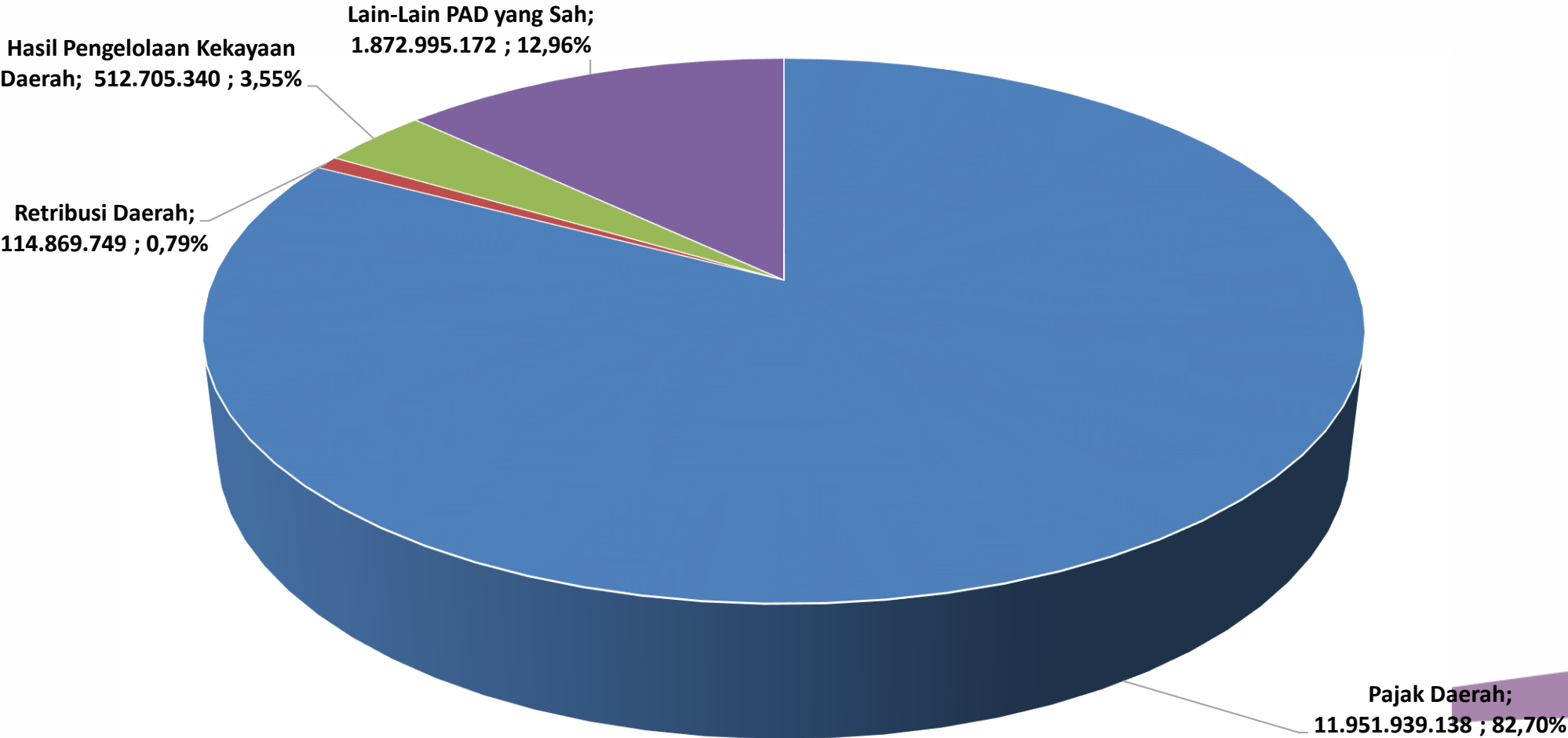
Update – Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Jawa Tengah



Komposisi Pendapatan Daerah Jawa Tengah 2019 (Ribu Rupiah)



Komposisi PAD Jawa Tengah 2019 (Ribu Rupiah)



■ Pajak Daerah ■ Retribusi Daerah ■ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ■ Lain-Lain PAD yang Sah



Pajak Daerah Merupakan Penyumbang Terbesar PAD Jawa Tengah

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Rokok
4. Pajak Bahan Bakar Kerndaraan Bermotor (PBBKB)
5. Pajak Air Permukaan (PAP)

Proyeksi PAD Jawa Tengah 2020

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Pertumbuhan Ekonomi	5.27	5.31	5.41	4.6	4.1 – 4
PAD	12,547,513,389.00	13,711,836,037.00	14,452,509,401.00	15,115,879,582.51 s/d 15,365,907,995.14	15,734,701,018.79 s/d 16,510,815,146.55
Pertumbuhan PAD		9.28	5.40	4.59 s/d 6.32	4.59 s/d 6.32
Elastisitas		1.75	0.99847	0.9985 s/d 1.37	0.9985

No	Uraian	Jumlah (Rp. 000)			
		R. 2017	R. 2018	R. 2019*)	2020**)
1.	PAD	12.547.513.389	13.711.836.037	14.452.509.401	15.993.530.006
1.1.	Pajak Daerah	10.572.698.332	11.507.119.643	11.951.939.138	13.440.249.764
1.2.	Retribusi Daerah	107.372.397	104.870.144	114.869.749	126.511.417
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	371.072.481	459.626.767	512.705.340	523.423.448
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.496.370.178	1.640.219.481	1.872.995.172	1.903.345.377
2.	Dana Perimbangan	11.067.786.491	10.933.776.831	11.334.903.060	12.214.821.794
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	848.309.911	769.449.921	575.968.321	776.824.622
2.2	Dana Alokasi Umum	3.652.586.431	3.652.586.431	3.784.512.513	3.830.691.947
2.3	Dana Alokasi Khusus	6.566.890.148	6.511.740.479	6.974.422.226	7.607.305.225
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	87.874.751	56.705.321	85.572.421	92.723.568
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.703.174.631	24.702.318.190	25.872.984.883	28.301.075.368

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, BAPENDA Prov. Jawa Tengah, dan BPKAD Prov. Jateng, 2020

Keterangan :

*) Realisasi APBD TA 2019 Unaudited

BEBAN BESAR YANG DITANGGUNG INDUSTRI



Tenaga kerja



Utilitas (Energi seperti listrik dan gas; air; telepon) dan sewa



Pajak dan retribusi daerah



Utang & Bunga Pinjaman

1

Relaksasi PPh21, PPh22, PPh25 dan pembebasan PPN (dalam kurun 6 bulan).

- Instrumen diberikan terbatas, bergantung pada sektor yang paling terdampak dan sasaran pada sektor padat karya khususnya umkm manufaktur dan umkm pariwisata.

2

Pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (dalam kurun 6 bulan)

3

Insentif bagi industri yang merubah lini produksinya menjadi pemenuhan kebutuhan medis

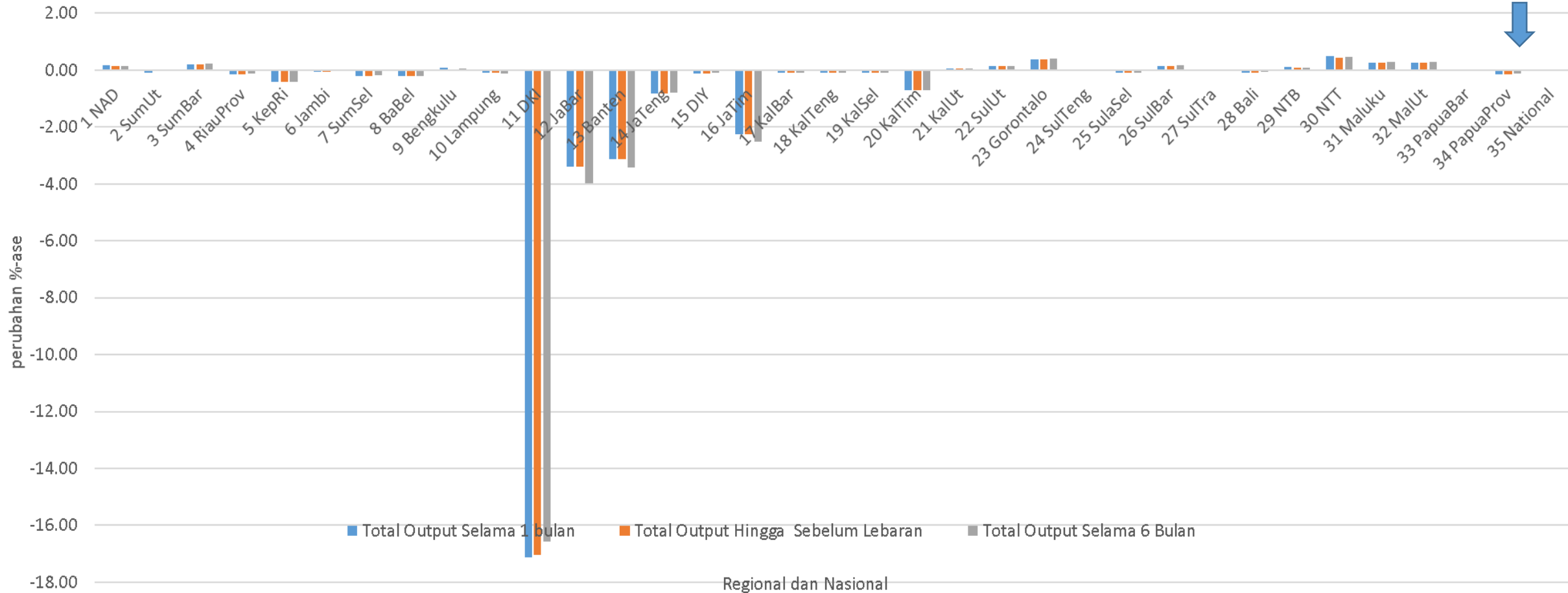
- Sasaran: perusahaan farmasi, elektronik dan tekstil

2

Kelonggaran utang dan bunga kredit

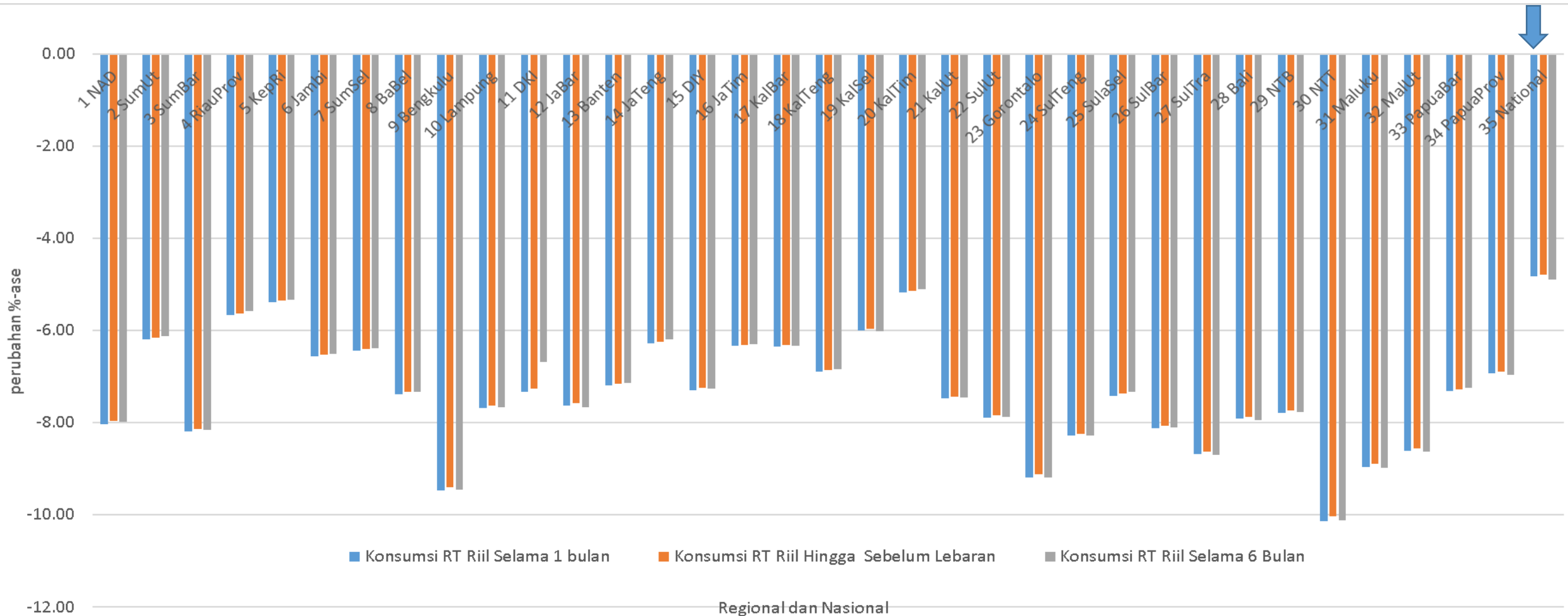
STIMULUS BAGI SEKTOR BISNIS DAN INDUSTRI

Dampak Covid-19 terhadap Jumlah Output Nasional dan Regional



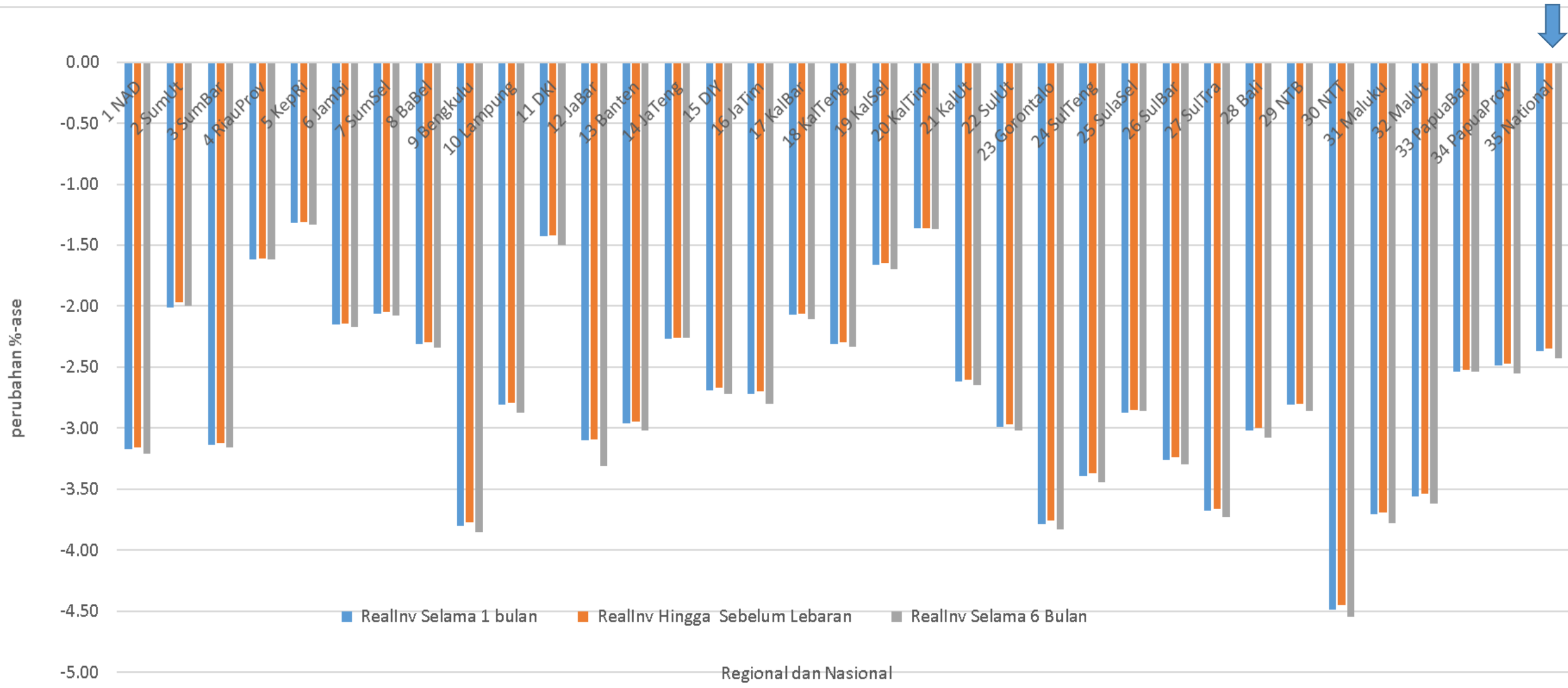
Sumber: Hasil Simulasi Model CGE IndoTERM, 2020

Dampak Covid-19 terhadap Konsumsi RT Nasional dan Regional



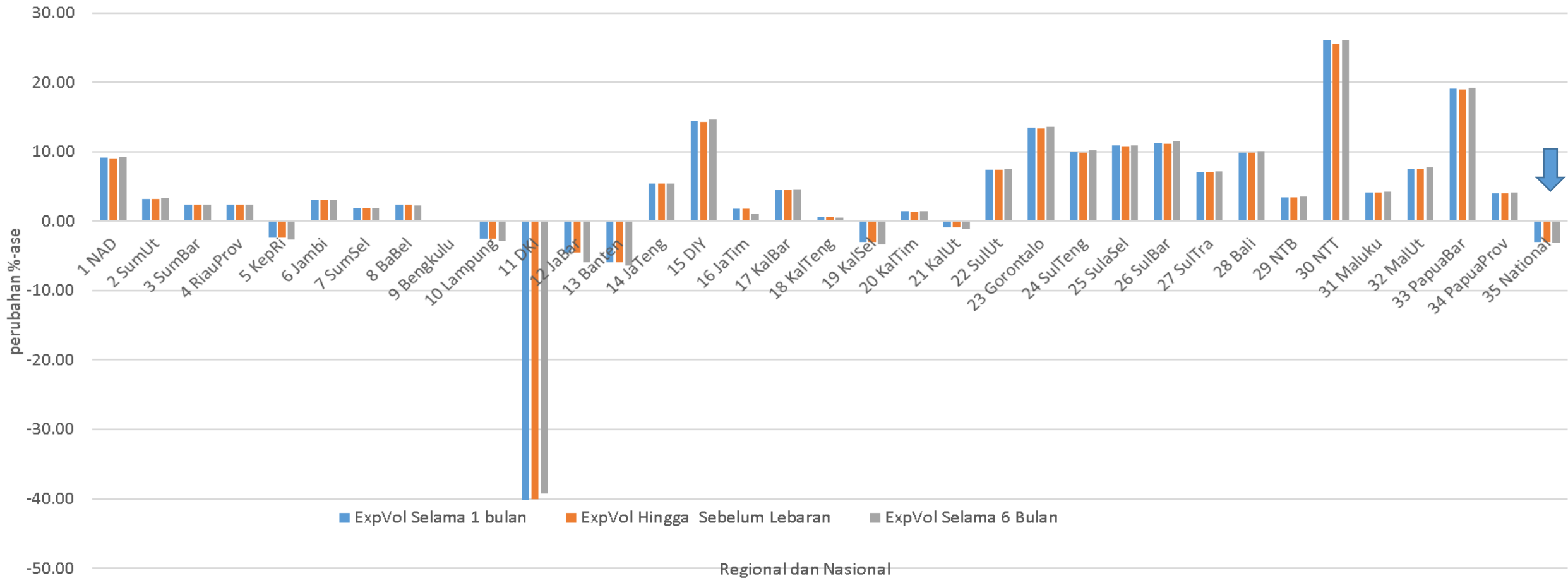
Sumber: Hasil Simulasi Model CGE IndoTERM, 2020

Dampak Covid-19 terhadap Investasi Nasional dan Regional



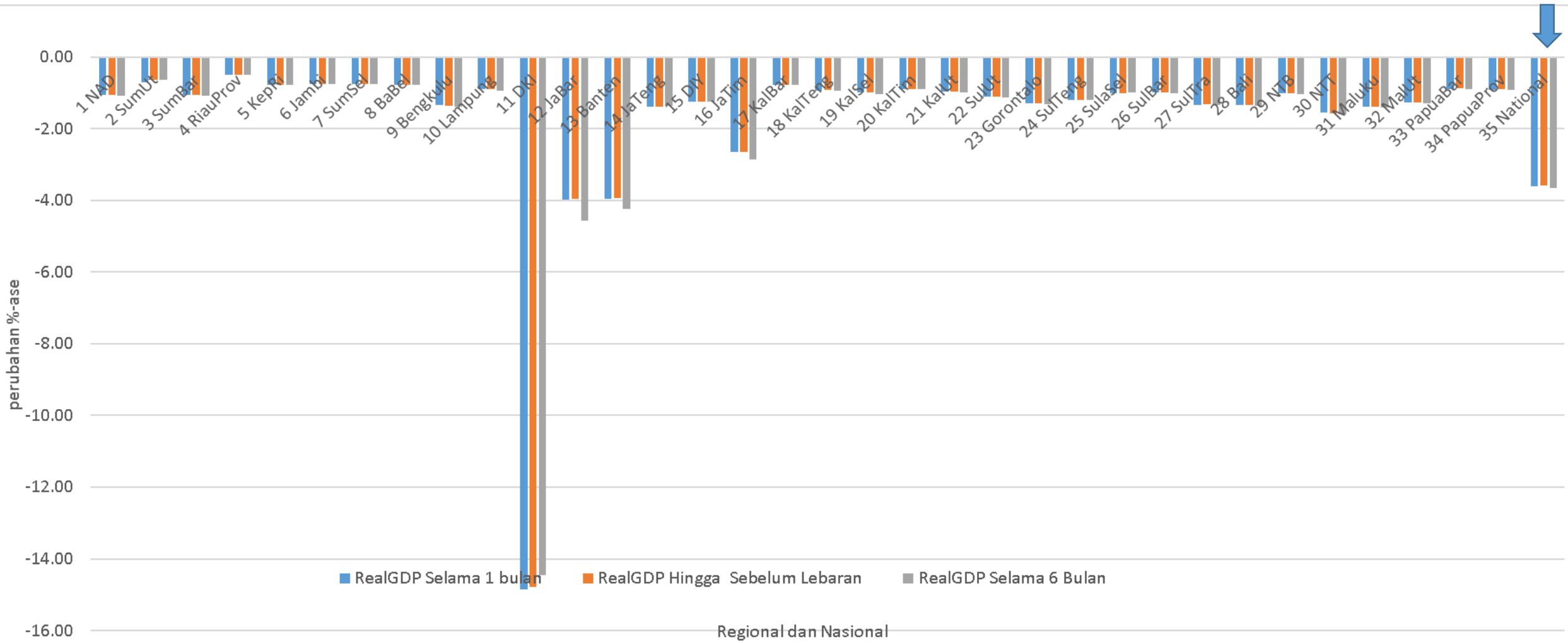
Sumber: Hasil Simulasi Model CGE IndoTERM, 2020

Dampak Covid-19 terhadap Volume Ekspor Nasional dan Regional



Sumber: Hasil Simulasi Model CGE IndoTERM, 2020

Dampak Covid-19 terhadap GDPriil Nasional dan PDRBriil Regional



Sumber: Hasil Simulasi Model CGE IndoTERM, 2020

Kondisi ekonomi Indonesia → berdasarkan hasil berbagai lembaga

- Penurunan ekonomi nasional baik jangka pendek maupun panjang
- Yang paling besar turun adalah Konsumsi RT → daya beli turun → kontributor terbesar PDB
- PDRB turun → penurunan produktivitas sektoral dan tenaga kerja → provinsi merah (DKI, Banten, Jatim, Jawa Tengah)
- Penurunan investasi dan kinerja industri
- PSBB perlu dilakukan untuk mengurangi penyebaran dan tidak memperarah kondisi ekonomi

Bila PSBB dilakukan

- Zona merah → PSBB ketat
- Menjamin daya beli ==> terutama untuk yang rentan → cash transfer → ketepatan sasaran
- Jaminan ketersediaan pangan dan produk bila PSBB
- Jaring pengaman → sisi demand side dan supply side
- Insentif public health
- Kebijakan makro ==> bauran kebijakan → likuiditas perbankan, kebij moneter untuk kondisi ekstrim pasar

USULAN PENGENDALIAN RISIKO COVID-19 KESEHATAN – EKONOMI – SOSIAL POLITIK

TIM UNIKA SOEGIJAPRANATA

dr. Sugeng Ibrahim, MBiomed.
(Risiko Kesehatan)

Dr. Ika Rahutami
(Risiko Ekonomi)

Benny Danang Setianto , SH., LLM.
(Risiko Sosial-politik)

Prof. Dr. Budi Widianarko
(Analisis Risiko)

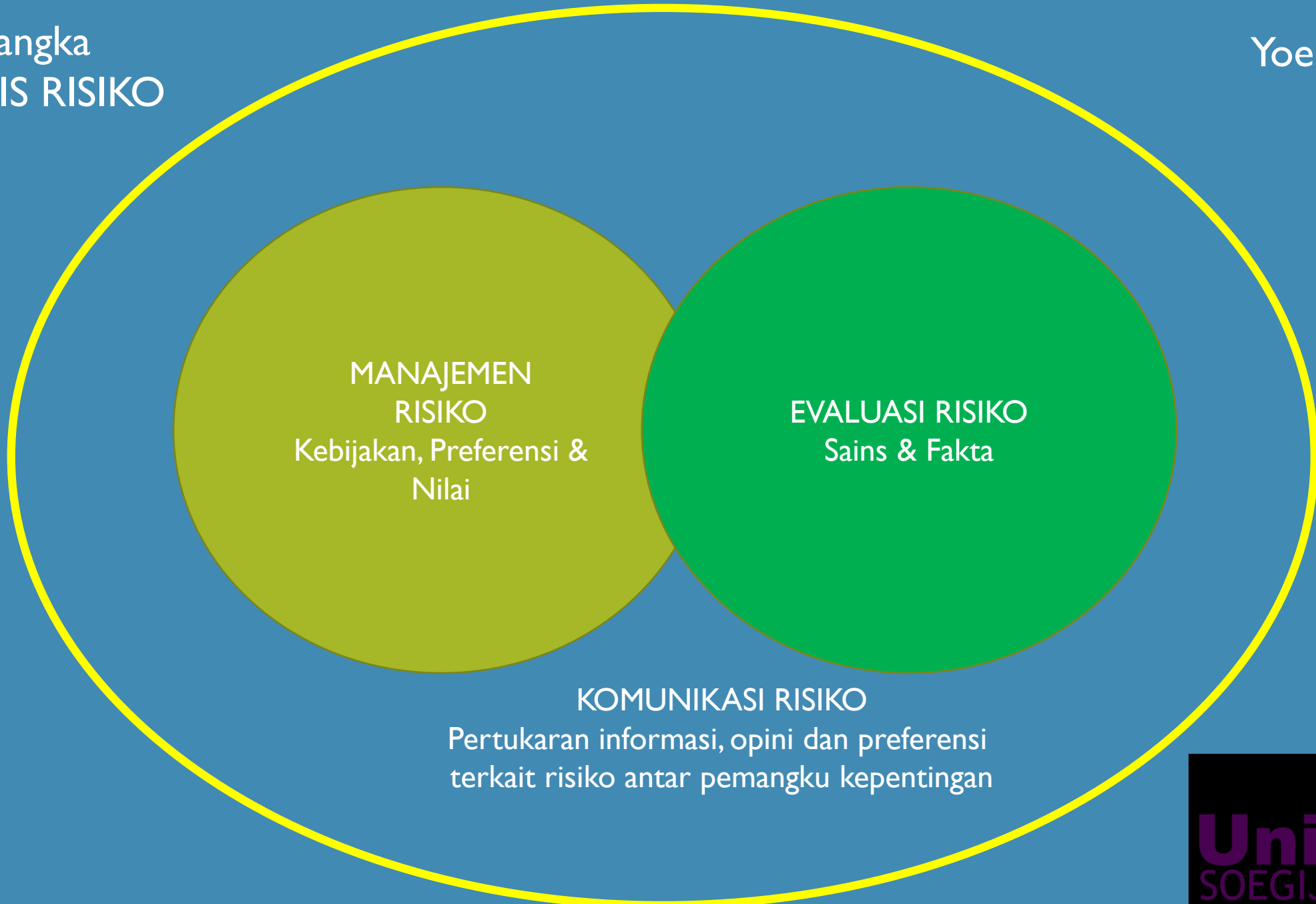
Abraham Wahyu Nugroho, SIKom, MA
(Komunikasi Risiko)

22 APRIL 2020

PENGANTAR

USULAN INI ADALAH HASIL KAJIAN BERBASIS ANALISIS RISIKO (*RISK ANALYSIS*): Virus **SARS CoV-2** sebagai **HAZARD** (bahaya) yang berpeluang memicu munculnya berbagai **RISK** (risiko)





MANAJEMEN
RISIKO
Kebijakan, Preferensi &
Nilai

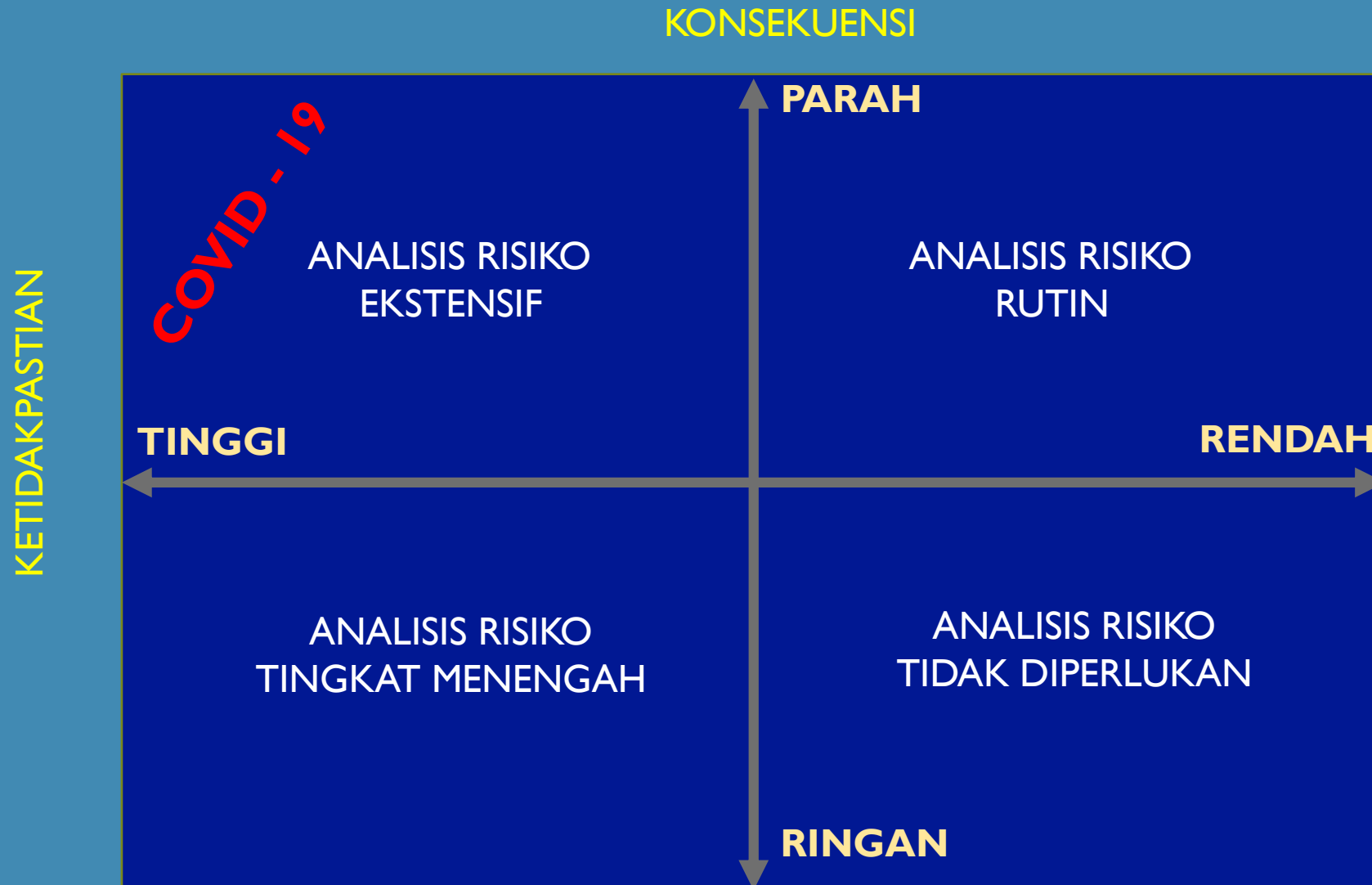
EVALUASI RISIKO
Sains & Fakta

KOMUNIKASI RISIKO

Pertukaran informasi, opini dan preferensi
terkait risiko antar pemangku kepentingan

ANALISIS RISIKO UNTUK KONDISI KRISIS

Yoe (2019)



PRINSIP:

PENGENDALIAN RISIKO UNTUK MEREDUKSI DAMPAK

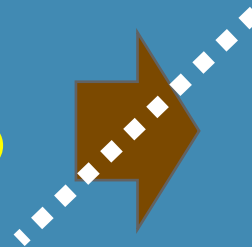
dengan mempertimbangkan kondisi yang tidak ideal dan sumber daya yang terbatas

A L A R A = As Low As Reasonably Achievable

HAZARD



RISKS



IMPACTS

SARS CoV-2

KESEHATAN-EKONOMI-SOSIAL POLITIK

SAAT INI



PENGELOLAAN RISIKO
FOKUS KE **EVALUASI**
PENGENDALIAN
RISIKO



RK = Komunikasi Risiko

KAJIAN INI JUGA
MENEKANKAN
PERAN VITAL
KOMUNIKASI
RISIKO

RISIKO KESEHATAN

RISIKO EKONOMI

RISIKO SOSIAL POLITIK